

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENSEJATERAKAN MASYARAKAT
DESA (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN PENGENTASAN
KEMISKINAN DI DESA WANGUNHARJA CIKARANG UTARA
KABUPATEN BEKASI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANDY RIAN TO

15370029

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya dalam masyarakat. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang kompleks. Pemerintah selalu berupaya menjalankan program-program untuk menanggulangi kemiskinan yang ada. Desa khususnya, kepala desa sebagai pemimpin di desa adalah sosok pemimpin yang bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Perannya dalam mengatasi kemiskinan sangat penting demi kesejahteraan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Ayat 1. Semua masyarakat menginginkan kesejahteraan hidup dan memiliki kemakmuran ekonomi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan Kepala Desa Wangunharja beserta jajarannya dan juga beberapa masyarakat setempat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran kepala desa Wangunharja dalam pengentasan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa Wangunharja telah berperan dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan dengan bertujuan mensejahterakan masyarakat desa Wangunharja dengan program-program yang telah dikeluarkannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala Desa Wangunharja berhasil mensejahterakan masyarakat desa wangunharja dalam permasalahan kemiskinan. Dimana angka kemiskinan di Desa Wangunharja menurun berkat kebijakan kepala desa wangunharja dalam mengeluarkan program pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci : Kepala Desa, kesejahteraan, kemiskinan

ABSTRAK

In everyday life, poverty is something that is real in society. Poverty itself is a complex problem. The government always strives to implement programs to overcome poverty. The village in particular, the village head as a village leader is a leader who can directly communicate with the community. Its role in overcoming poverty is very important for the welfare of society. We all know that everyone has the right to live physically and spiritually, live in, and get facilities and special treatment to obtain equality and justice based on Article 28 of the 1945 Constitution. Article 1. All people want welfare and have economic prosperity.

This research is field research conducted in Wangunharja Cikarang Utara Village, Bekasi Regency. This study uses an interview method with the Head of Wangunharja Village along with his staff and also some local communities.

This research was conducted to determine the role of the village head of Wangunharja in poverty alleviation. The results of this study indicate that the village head of Wangunharja has played a role in implementing poverty alleviation by aiming at the welfare of the Wangunharja village community with the programs that have been issued.

Based on the results of the study, the head of Wangunharja Village succeeded in prospering the people of Wangunharja village in the context of poverty. Where the poverty rate in Wangunharja village declined due to the policy of the village head of Wangunharja in issuing poverty alleviation programs.

Keywords: Village Chief, welfare, poverty

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andy Rianto

NIM : 15370029

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Andy Rianto

NIM. 15370029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andy Rianto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andy Rianto

NIM : 15370029

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa
(Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa
Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M

Pembimbing,



Dr. AHMAD PATTIROY, M. Ag.

NIP. 19620327 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-75/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KEPALA DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
DESA (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA
WANGUNHARJA CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDY RIAN TO
Nomor Induk Mahasiswa : 15370029
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya.

(Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning)

Albert Einstein



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan penuh rasa Syukur Alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ibu Tercinta Hj. Anih Farida dan Ayah Tercinta H. Rosid yang telah menjaga, menyayangi, memotivasi, guru pertama dan selamanya dalam hidup ini, dan harapan surga bagi saya.

Adik Tersayang Amanda Putri Rosiani.

Keluarga yang sudah memberikan semangat sehingga terselesaikan salah satu tanggung jawab saya ini.

Guru-guru saya yang telah banyak memberikan ilmu yang tak pernah ternilai jasanya dan tak akan pernah terbalaskan kasih sayangnya.

Untuk Nanda Ayu Lestari, S.E. yang selalu menyemangati dan menemani dalam apapun itu.

Dan tak lupa untuk Almamater Hukum Tata Negara 2015, semoga langkah kita dalam mencari ilmu selalu dalam Ridho Ilahi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
زَيْزَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُود	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْتُكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	---------------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>	
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>	

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>	
الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>	

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّكَ الْخَيْرِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَوَحْشِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menjadikan siang dalam malam hanya untuk beribadah kepada-Nya dalam setiap apapun bentuk aktivitas Hamba-Nya. sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PERAN KEPALA DESA WANGUNHARJA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DES (STUDI KASUS DI DESA WANGUNHARJA CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI”. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepala Desa Wangunharja Cikarang Utara beserta Jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan wawancara.
8. Masyarakat di wilayah Desa Wangunharja yang telah membantu lancarnya penelitian dalam skripsi ini.

9. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan penulisan skripsi ini.
10. Nanda Ayu Lestari, S.E. yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi khusus untuk terus mau belajar dan berusaha.
11. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Teman-teman Jama'ah Alumni Darusslam Yogyakarta yang juga tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Jazākumullāhu khairan Kasīran.

Tidak ada daya dan upaya melainkan atas kekuatan Allah SWT yang Maha Menyayangi Hamba-Nya yang mau berusaha dan berdoa dalam setiap urusan. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1440 H
8 Februari 2019 M

Andy Rianto
NIM: 14370013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLATE ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Seorang Pemimpin Menurut Konsep Teori Peran	21
B. Pemimpin Dalam Konsep Teori Siyasah Dusturiyah	25
BAB III GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEPALA DESA WANGUNHARJA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN	
A. Gambaran Umum Desa Wangunharja	32
1. Sejarah Desa Wangunharja	32
2. Letak Geografis	33
3. Struktur Pemerintahan Desa	33
4. Jumlah Penduduk	35
5. Mata Penceharian Penduduk	36
6. Tingkat Pendidikan Penduduk	37
7. Sarana dan Prasarana	38

B. Kebijakan Kepala Desa Wangunharja Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan	39
1. Indikator Kemiskinan Di Desa Wangunharja	39
2. Program Pengentasan Kemiskinan.....	41
 BAB IV ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA TERHADAP KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH	
A. Santunan	56
B. Bantuan Raskin	58
C. Kerjasama Dengan Perusahaan Untuk Memperkerjakan Masyarakat.....	60
D. Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni).....	62
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susuna Kepala Desa	32
Tabel 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Wangunharja.....	34
Tabel 3.3 Staf Pembantu	34
Tabel 3.4 Golongan Usia Masyarakat.....	35
Tabel 3.5 Mata Pencaharian	36
Tabel 3.6 Jenis Sarana dan Prasarana	38
Tabel 3.7 Santunan Anak Yatim Piatu.....	42



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.¹ Sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya).²

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat hud ayat 6 :

وما من داب في الأرض إلا نحى الله لرحمة رزقها في يوم مقرر لها ومن تودعها كلف في كتاب يحين³

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan

¹ Rambe, Armaini. 2011. *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

² Notowidigdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*. Jakarta: Rajawali Pers.

³ Hud (11): 6.

spiritual.⁴ Ayat yang menjadi rujukan kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9:

لِيُخْشِيَ الْفَيْزَ وَيَتْرَكَوا مِنْ حَيْثُ هُمْ ذِي عَظْمٍ خَلَوْا فِي هِمْلٍ لِيَقْبَلُوا اللَّهَ وَيُقْبَلُوا لَهُمْ دِينُهُمْ

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)” (Qardhawi, 1995: 256).⁶

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷ Maka kesejahteraan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya

⁴ Amirus Sodik. 2015. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Jurnal Equilibrium*. Vol. 3. No. 2. Hal. 388.

⁵ An-Nisa (4): 9.

⁶ Amirus Sodik. 2015. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Jurnal Equilibrium*. Vol. 3. No. 2. Hal. 391.

⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas deesentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah akan memberikan kebebasan kepada daerah. Menurut masyarakat desa otonomi daerah bagi desa kehadirannya merupakan hal yang wajar, karena kebijakan ini bagi masyarakat desa di anggap akan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih baik dalam memajukan masyarakatnya melalui langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.⁹

Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dalam pelaksanaan otonomi daerah dan Desentralisasi telah diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan kerjasama antar daerah yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.¹⁰

Masalah kemiskinan dan kaum fakir bukanlah masalah baru. Sejak dahulu, berbagai agama dan aliran filsafat mencoba memecahkannya untuk mengakhiri

⁸ Theresia Ngutra. 2017. *Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Masyarakat*. hal-7

⁹ Sakinah. 2013 *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profektik. Vol. 1 No. 1. Hal.

¹⁰ Ahmad Surkati. 2012. *Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah*. Jurnal Mimbar. Vol. 28. No. 1. Hal. 42.

penderitaan kaum fakir. Bagi negara-negara berkembang yang mayoritasnya terdiri dari negara-negara muslim, kemiskinan merupakan masalah sehari-hari yang hampir tidak disadari. Krisis ekonomi yang melanda dunia khususnya benua Asia, membuka mata lebar-lebar betapa sebenarnya negara kita Indonesia yang muslim dan mayoritas negara-negara muslim lainnya teramat miskin.¹¹ Kemiskinan merupakan sesuatu yang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri. Implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah.¹²

Di Indonesia masalah kemiskinan bukan merupakan masalah baru. Bahkan masalah ini telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah Kolonial Belanda sejak permulaan abad ini ketika pemerintah Kolonial Belanda meluncurkan suatu program anti kemiskinan yang dikenal dengan politik etis. Bahkan sesudah Indonesia merdeka, masalah ini tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia pada masa orde lama dan orde baru. Meskipun masalah ini telah lama hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia dan telah lama pula diupayakan untuk dihapuskan namun kemiskinan itu tetap ada hidup bersama bangsa ini.

¹¹ H. Wildana Wargadinata. 2011. *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. UIN-Maliki Press. Hal.1.

¹² HM. Said Ibrahim. 2007. *Kemiskinan dalam Perspektif Al-qur'an*. UIN-Malang Press. Hal.3.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹³

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk guna memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan telah dijadikan pilihan mekanisme untuk mengisi kemerdekaan bangsa (Soeharto 2008: 238).¹⁴ Untuk memajukan kesejahteraan umum, secara khusus pemerintah diwajibkan memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan membedayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.¹⁵ Karena kemiskinan memang merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Karena sifat dari multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa yang telah direvisi dari Undang-Undang sebelumnya yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

¹³ UU Nomor 13 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1.

¹⁴ Soeharto. 2008. *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Otobiografi seperti Dipaparkan Kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.* Jakarta: Citra Kharisma Bunda.

¹⁵ UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia.¹⁶

Posisi desa yang berada pada garis terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat akan sangat menentukan penampilan sistem pemerintah yang ada di atasnya. Suksesnya pemerintah desa dalam menjalankan program-program pembangunan di desa merupakan sukses pula pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pemerintah pusat, karena pembangunan desa merupakan bagian integral pembangunan nasional. Dimana pembangunan desa selayaknya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat desa. Maka disini pemerintah desa posisinya sangatlah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah yang posisinya paling dekat dengan masyarakat, harus bisa mengeluarkan kebijakan atau program dalam pengentasan kemiskinan yang dimulai dari masyarakat pedesaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa: “Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan

¹⁶ UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 huruf a

dilantik oleh kepala bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya”.¹⁷

Di dalam kedudukannya kepala desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman. Menurut Widjaja dalam bukunya : “kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat”.¹⁸

Kepala Desa Wangunharja sebagai pemimpin Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa dengan bertujuan untuk mensejahterakan dan juga untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di desa wangunharja sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

¹⁸Widjaja, HAW.2003. *Otonomi Desa*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 81 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa, bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan¹⁹:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa;
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong;
3. Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa;
4. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan oleh Desa sendiri;
5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Maka dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan pedoman untuk kepala Desa Wangunharja dalam mengupayakan kebijakan program pengentasan kemiskinan sebagai langkah mengatasi kemiskinan bagi masyarakat di Desa Wangunharja. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat miskin mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sebagaimana pembangunan desa yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diangkat pada penelitian ini adalah **“PERAN KEPALA DESA DALAM MENSEJATERAKAN MASYARAKAT DESA (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA WANGUNHARJA CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana peran Kepala Desa Wangunharja pada pelaksanaan pembangunan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten bekasi?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Wangunharja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan dan bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan yang ada.

Secara rinci, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dijadikan ilmu pengetahuan tentang upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Wangunharja dalam memberantas kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Wangunharja
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan kepala Desa Wangunharja

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan akademis menyangkut ilmu syari'ah, khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) mengenai Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Dimana pada akhirnya penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan rujukan ilmiah atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara Praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan baik semua kalangan terkait upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai informasi bagi para pemerintahan di daerah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka mempunyai peran yang sangat penting, agar menghindari kesamaan dalam penelitian. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema tulisan ini sebagai berikut:

Theresia Ngutra (2017) dengan judul *“Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar”*. Hasil penelitian ini yaitu terkait program kesejahteraan sosial oleh pemerintah Kota Makassar belum dilakukan secara optimal, faktor determinan dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang dihadapi pemerintah kota Makassar sehingga program kesejahteraan tidak terlaksana dengan baik adalah dikarenakan oleh beberapa faktor, dan strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar adalah melalui pembangunan rumah susun berpola asrama.

Rosni (2012) dengan judul *“Analisi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”*. Hasil dari penelitian ini adalah terkait upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Dahari Selebar sebaiknya pemerintah memberi bantuan modal usaha ataupun bantuan dalam bentuk pendidikan dan latihan keterampilan yang dapat diperoleh secara langsung, disarankan kepada masyarakat nelayan untuk mengubah pola pikirnya agar tidak terpusat pada satu pekerjaan saja tetapi bekerja sampingan pada bidang lain sehingga dapat menambah pendapatan

mereka, dan pemerintah melalui lembaga penyuluhan-penyuluhan agar dapat memperhatikan dan membimbing nelayan dalam mengelola pekerjaannya agar pendapatan keluarga nelayan menjadi lebih meningkat.

Skripsi Didin Ismoyo dengan judul *“Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan”*. Dari hasil yang ditulis Didin Ismoyo ini menjelaskan terkait fakto-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan Di Desa Cangkol.

Nunung Nurwati (2008) dengan judul *“Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan”*. Hasil dari yang ditulis adalah terkait bentuk kebijakan dan program yang ada masih dirasakan kurang untuk mengatasi kemiskinan. Dan terkait kebijakan dan program kemiskinan harus dilakukan dengan cara konfrehensif dengan melibatkan semua unsur baik dari kalangan masyarakat maupun dari pihak pemerintah.

Rusdati dan Lesta Karolina Sebayang (2013) dengan judul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”*. Pada jurnal ini memaparkan terkait kemiskinan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Bahwa perubahan kemiskinan di Jawa Tengah tidak mengalami perubahan yang signifikan karena kebijakan belanja daerah yang konsisten.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yakni di Desa Wangunharja. Selain itu yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah upaya kepala Desa

Wangunharja dalam mensejahterkan masyarakat melalui kebijakan program pengentasan kemiskinan yang ada.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian mempunyai peran yang sangat penting, dimana sebagai pijakan dalam meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam. Maka dari itu penulis dalam penelitian ini akan menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berasal dari sosiologi dan antropologi.²⁰

Linton (1936) seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena

²⁰ Sarwono, S.W. 2002. "Teori-teori Psikologi Sosial." PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya.²¹

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan di masyarakat. kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang-pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²²

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat

²¹ Cahyono, Dwi. 2008. *“Persepsi ketidakpastian lingkungan, Ambiguitas Peran, dan Konflik Peran Sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah.”* Disertai Tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang.

²² R. Suyoto Bakir. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.hlm. 348.

- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²³

2. Teori Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah berasal dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyyah*. Kata *siyasah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyasah* dikenal dalam bahasa arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyasah syar'iyah*.²⁴

Muhammad Iqbal menjelaskan *dusturi* juga disebut sebagai konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa persia, artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah sendiri *dusturi* adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar, dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara.²⁵

Kesimpulannya, fikih *Siyasah Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tersebut, sudah tentu ruang

²³ Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 242.

²⁴ Abd Halim. 2013. *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*. LKiS. Yogyakarta. Hal. 23-24.

²⁵ M. Faizur Ridha. 2017. *Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyyah (Kajian Sistem Pemerintah)*. Skripsi UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh.

lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu ilmu *Siyasah Dusturiyah* ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*)²⁷ yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian di Desa Wangunharja Kabupaten Bekasi dengan kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat setempat, observasi, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan lainnnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga,

²⁶ A. Djazuli. 2007. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal. 73.

²⁷ Field research adalah penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data langsung kedaerah yang menjadi objek penelitian.

masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

3. Sumber data

1) Data Primer

Data Primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa wangunharja beserta jajarannya, dan beberapa masyarakat setempat.

2) Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

4. Teknik pengumpulan data

Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

diwawancarai.²⁸ Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan Kepala Desa Wangunharja dan beberap stafnya serta beberapa masyarakat Desa Wangunharja

b. Observasi

Pada hal ini yang digunakan adalah observasi partisipasi. Yaitu metode pengumpulandata yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan dengan yang diteliti.²⁹

Pada hal ini yang digunakan adalah observasi partisipasi. Yaitu metode pengumpulandata yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

d. Dokumentasi

Sebagian besar fakta dan data yang tersedia dalam bentuk dokumentasi biasanya adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.

²⁸ Pupu Saeful Rahmat. “*Peneltian Kualitatif*”. Jurnal Equilibrium. Vol. 5. No. 9. (Januari-Juni 2009). Hlm.6-7

5. Pengelola dan Teknik Analisi Data

- a. Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokkan untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji sehingga setelah pengelolaan data siap dipakai untuk dianalisis.
- b. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian akan disajikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitanya dengan objek penelitian ini. Kelima, kerangka teoritik, menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. Keenam, metodologi penelitian, berupa penjelasan langkah-langka penelitian yang telah dilakukan. Ketujuh, sistematika pembahasan.

Bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang akan dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan adalah Teori Peran, dan Teori *Siyasah Dusturiyyah*.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum dan kebijakan kepala Desa Wangunharja dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bab keempat berisi tentang analisis yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu Peran kepala Desa Wangunharja dalam mensejahterakan masyarakat melalui upaya kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Wangunharja.

Bab V dimana merupakan penutup dari penelitian. pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari analisis yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan akan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah di rumuskan. Selain itu pada bab ini juga akan memuat terkait kesimpulan dan saran yang akan penulis sampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dalam penelitian skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)” kepala Desa Wangunharja telah melakukan banyak peran sebagai pemimpin di Desa Wangunharja dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pertama, kepala Desa Wangunharja sudah membuat 4 program kebijakan dalam upaya mensejahterakan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, yaitu: Santunan untuk anak yatim piatu, bantuan Raskin, kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk memperkerjakan masyarakat desa wangunharja yang menjadi pengangguran, Ratilahu (Rumah Tidak Layak Huni). Dari 4 program tersebut angka kemiskinan di Desa Wangunharja mengalami penurunan yang awalnya mencapai 700 jiwa penduduk menjadi 200 jiwa penduduk.

Kedua, dari ke empat program yang dilaksanakan oleh kepala Desa Wangunharja ini sejalan dengan konsep siyasa dusturiyah yaitu memenuhi hak-hak rakyat dalam upaya memelihara dan menjaga masyarakat untuk hidup sejahtera. Empat program tersebut juga sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 pada pasal 28 H Ayat (1 dan 2). Dan juga sesuai dengan Peraturan Desa yang memuat tentang pembinaan dan pemberdayaan untuk masyarakat miskin.

Ketiga, kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Wangunharja dapat penulis simpulkan berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena masyarakat merasakan dampak positif atas kebijakn kepala Desa Wangunharja tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa: Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi”, maka penyusun ingin menyampaikan beberapa saran di antaranya:

1. Kepala Desa Wangunharja sebagai pemimpin di Desa Wangunharja dan selaku pembuat kebijakan untuk menjaga pemerintahannya yang baik dalam melayani masyarakat.
2. Setiap kebijakan yang telah dikeluarkan dan berjalan dengan baik harus diawasi terus agar tidak terjadi penyimpangan terhadap kebijakan tersebut karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat.
3. Harus adanya koordinasi yang kuat antara kepala desa dengan pihak-pihak yang telah ikut serta dan membantu berjalannya kebijakan kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan agar terus terlaksana dengan baik program-program tersebut.
4. Dan kepala Desa Wangunharja harus tetap memainkan perannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat

sebagai bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan segala bentuk hak masyarakat bisa terpenuhi sebagai warga negara.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QUR'AN DAN HADITS

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 5.

Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 118.

Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 33.

Al-Qur'an Surat Al-Mulk Ayat 15.

Al-Qur'an Surat Al-Quraisy Ayat 4.

Al-Qur'an Surat An-Naba Ayat 11.

Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 80.

Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58.

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9.

Al-Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 3.

Al-Qur'an Surat Hud Ayat 6.

Al-Qur'an Surat Shad ayat 26.

HR al-Bukhari (no. 4998 dan 5659)

2. UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81.

UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1.

UU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 huruf a.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81

UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2.

3. BUKU

Abd Halim. 2013. Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan. LKiS. Yogyakarta.

Abd Halim. 2013. Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan. LKiS. Yogyakarta.

Abdul Wahab Khalaf. 1994. Politik Hukum Islam. Tiara Wacana. Yogyakarta

Abul A'la al-Hambali. 1972. Al-Dawa'un 'ala Harakat al-Tadhamun al-Islam, alih bahasa Abdullah Suhaeli. Sinar Hudaya. Jakarta.

Ahmad Djazuli. 2007. Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Ali Ahmad As-Salus. 1997. Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah. Gema Insani Prees. Jakarta.

Al-Mawardi. Op. cit.

Bernard Lewis. 1988. The Political Language of Islam. Chicago:Unniversity of Chicago Press.

Cahyono, Dwi, 2008. "Persepsi ketidakpastian lingkungan, Ambiguitas Peran, dan Konflik Peran Sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah." Disertai Tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang.

Departemen Agama RI. 2006. Al-qur'an Tajwid dan Terjemahnya. PT. Syaamil Cipta Media. Bandung.

A. Djazuli. 2007. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- Dr. Kartini Kartono. 2010. Pemimpin dan Kepemimpinan: apakah kepemimpinan Abnormal itu?. Rajawali Press. Jakarta.
- Dr. Muhammad Iqbal. 2014. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Dr. Syarifuddin Jurdi. 2010. Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, Dan Aksi Sosial. PT Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta.
- H. Wildana Wargadinata. 2011, Islam dan Pengentasan Kemiskinan. Malang. UIN-Maliki Press.
- HM. Said Ibrahim. 2007, Kemiskinan dalam Perspektif Al-qur'an. Malang. UIN-Malang Press.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. I'lam al-Muwaqqi 'an Rabb al'Alamin. Beirut: Dar al-Jayl. T. th.
- Muh. Arief Effendi. 2016 (edisi 2). The Power Good Corporate Governance Teori dan Implementasi. Jakarta. Salemba Empat.
- Notowidigdo, Rohiman. 2016. Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Suyoto Bakir. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Tangerang: Karisma Publishing Group. 2009.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. Teori-Teori Psikologi Sosial. Rajawali Press. Jakarta.
- Sarwono, S.W. 2002. "Teori-teori Psikologi Sosial". Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soeharto, 2008. Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Otobiografi seperti Dipaparkan Kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. Jakarta: Citra Kharisma Bunda.

Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 242.

Widjaja, HAW.2003. Otonomi Desa. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.

4. JURNAL (KARYA ILMIAH)

Ahmad Surkati. 2012. Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah. Jurnal Mimbar. Vol. 28. No. 1.

Amirus Sodik. 2015. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Jurnal Equilibrium. Vol. 3. No. 2.

Herry Prastyanto. Perlindungan Sungai Pekalongan dari Akibat Kegiatan Home Industri di Kota Pekalongan. <http://e-journal.uajy.ac.id/2907/2/1HK09147.Pdf>.

James R. Situmorang. 2011. Perencanaan Jangka Panjang di Perusahaan. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 7. No. 1.

M. Faizur Ridha. 2017. Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintah). Skripsi UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh.

Mia Fitriah Elkarimah. 2016. Etos Kerja Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. Jurnal An-Nuha Vol. 3. No. 1.

Muatofa Hasan. 2014. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih. Jurnal Madania. Vol. XVIII. No. 1.

Pupu Saeful Rahmat. "Peneltian Kualitatif". Equilibrium. Vol.5. No.9. (Januari-Juni 2009).

Rambe, Armaini. 2011. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara). Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Ruaida Murni. 2015. Pemahaman Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat Tentang Program Subsidi Raskin. Jurnal Sosio Konsepsia. Vol 5. No. 01.

Saifudin Zuhri. 2013. Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Peringatan Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Manajemen dan Akutansi. Vol. 2. No. 3. Hal. 47.

Sakinah. 2013 Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profektik. Vol. 1 No. 1.

Theresia Ngutra. "Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Masyarakat". 2017.

Titik dan Nurhayati dan Ahmad Darwansyah. 2013. Peran Struktur Organisasi dan Sistem Remunasi Dalam Meningkatkan Kinerja. Jurnal Ekobis. Vol. 14. No. 2.

5. LAIN-LAIN

Data Kependudukan Desa Wangunharja bulan Desember 2018.

Hasil Wawancara Bersama Bapak H. Encep pada tanggal 25 Januari 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Ganda selaku kepala Desa Wangunharja pada tanggal 24 Januari 2019.

Profil Desa Wangunharja Tahun 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA